

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



**RENCANA KERJA
Tahun 2020**

**Jl. Pembangunan No. 7 Rantau Telp. 0517 – 31052, 31510
Fax. 0517-31052 Rantau Kabupaten Tapin Kode Pos 71111
Email : bppkb.tapin@Gmail.com**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2018.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Rentra SKPD.....	6
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD DPPKB	25
3.3 Program dan kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP	39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin Tahun 2020.

Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai program prioritas yang telah disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin.

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi segenap pihak yang berkepentingan, terutama dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Tapin.

Rantau, Juli 2019
Kepala

NOOR FANSYAH, SKM, MS
Pembina Utama Muda
NIP.19660723 198903 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 , merupakan bentuk pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . Undang – Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan , Program dan Kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai unit kerja perencanaan tugas ,fungsi , kewenangan serta tanggung jawab di bidang keluarga berencana, bidang ketahanan kesejahteraan keluarga dan bidang pengendalian penduduk dan penyuluhan diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah .oleh karena itu diperlukan tenaga yang handal dan dengan di dukung aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga sasaran dan prioritas dapat dicapai untuk peningkatan pembangunan di daerah.

Dalam Rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , maka disusunlah Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Tahun 2020 SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

1. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anatar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah , tata cara evaluasi, Rancangan peraturan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014 – 2034;
19. Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 03 Oktober 2016.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dan mengacu kepada RKPD Tahun 2020.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun ke lima yang merupakan tujuan akhir perencanaan pembangunan lima tahunan.
2. Tersusunya Tujuan ,Sasaran Peningkatan Pelayanan, Target Capaian Kinerja , serta Pengorganisasian Program dan Kegiatan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
5. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
6. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
7. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja .

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun 2020 secara garis besar memuat 5 (Lima) BAB yang terdiri dari :

1. BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD, Landasan hukum, serta Sistematik penulisan;
2. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019
Berisikan tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan capaian tahun 2020
3. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SKPD
Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;
4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisikan tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan
5. BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA 2018

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DPPKB, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun-tahun sebelumnya.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKB TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kab. Tapin tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun – tahun sebelumnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel.II.1 berikut ini :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019
KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
2	8	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bulan)	12		12	12	100

2	8	1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12		12	12	100		12	100
2	8	1	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12		12	12	100		12	100
2	8	1	4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12		12	12	100		12	100
2	8	1	5	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian makanan dan minuman rapat bulanan (bulan)	12		12	12	100		12	100
2	8	1	6	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas luar daerah dan dalam (bulan)	12		12	12	100		12	100
2	8	1	7	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo (kali)	1		1	1	100		1	100
2	8	1	8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan	12		12	12	100		12	100
2	8	1	9	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihankeamanan kantor dan bahan pembersih	12		12	12	100		12	100
2	8	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100		100	100	100		100	100
2	8	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (roda 4 dan 2) (Unit)	48		48	48	100		48	100
2	8	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12		12	12	100		12	100
2	8	2	3	Pengadaan Peralatan Kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan kantor	12		12	12	100		12	100
2	8	2	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (bulan)	12		12	12	100		12	100

2	8	3		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100		100	100	100		100	100
2	8	3	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13		13	13	100		13	100
2	8	3	2	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2		2	2	100		2	100
2	8	4		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi	Persentase Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	92		70,70	70,70	100		70,7	76,85
2	8	4	1	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu (bulan)	12		12	12	100		12	100
2	8	4	2	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD) (Akseptor)	608		608	608	100		608	100
2	8	4	3	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita (orang)	130		130	130	100		130	100
2	8	4	4	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB (bulan)	12		12	12	100		12	100
2	8	4	5	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan kegiatan monitoring Evaluasi alat Obat dan Kontrasepsi KB (Desa)	136		136	136	100		136	100
2	8	4	6	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kesertaan KB dan Kespro (orang)	26		26	26	100		26	100
2	8	5		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	8,83		7,58	7,58	100		7,58	85,84
2	8	5	1	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	12		12	12	100		12	100
2	8	5	2	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes (kali)	1		1	1	100		1	100
2	8	5	3	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana (Kelompok)	225		225	225	100		225	100

2	8	6		Program Generasi Berencana (Genre)	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	71,12		66,07	66,07	100		66,07	92,90
					Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (%)	92,80		90,02	90,02	100		90,02	97,00
2	8	6	1	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba kelompok PIK remaja kelompok dan kader BKR (kali)	3		3	3	100		3	100
2	8	6	2	Ajang Kreativitas PIK-Remaja	Jumlah pelaksanaan kegiatan jambore dan ajang kreativitas PIK-remaja (kali)	3		3	3	100		3	100
2	8	6	4	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja dan kelompok BKR (Kelompok)	16		16	16	100		16	100
2	8	7		Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS (%)	92,19		91,99	91,99	100		91,99	99,78
					Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB (%)	84,07		83,83	83,83	100		83,83	99,71
					Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL (%)	73,66		71,86	71,86	100		71,86	97,56
2	8	7	1	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan kegiatan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (kali)	3		3	3	100		3	100,00
2	8	7	2	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (Kelompok)	32		32	32	100		32	100,00
2	8	7	3	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional (kali)	3		3	3	100		3	100,00
2	8	7	4	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional (kali)	2		2	2	100		2	100,00
2	8	7	6	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKBBKL dan orang tua hebat (kali)	3		3	3	100		3	100,00
2	8	7	7	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK (kali)	3		3	3	100		3	100,00

2	8	7	10	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL) (Kelompok)	2		2	2	100		2	100,00
2	8	7	11	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (kali)	3		3	3	100		3	100,00
2	8	8		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan (%)	85		60	60	100		60	70,59
2	8	8	1	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	12		12	12	100		12	100,00
2	8	8	2	Pembinaan Koalisi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan koalisi kependudukan (orang)	180		180	180	100		180	100,00
2	8	9		Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	85		60	60	100		60	70,59
2	8	9	1	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB (Dokumen)	240		240	240	100		240	100,00
2	8	10		Program Advokasi dan Penggerakan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra Kerja (%)	50		20	20	100		20	40,00
2	8	10	1	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan advokasi (bulan)	12		12	12	100		12	100,00
2	8	10	2	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi kampung KB (orang)	250		250	250	100		250	100,00
2	8	10	3	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	12		12	12	100		12	100,00

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur			2,19	2,18	2,17	2,16	2,19		2,17	2,16	
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeed Need)			9,11	9,88	9,84	9,82	9,11		9,84	9,82	
3	Persentase Peningkatan Kesertaan Ber-KB (CPR)			82,98	83,12	83,16	83,20	82,98		83,16	83,20	
4	Persentase Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam program KKBPK			70	72	75	77	70		75	77	

2.3. ISU –ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sering dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut seringkali menjadikan tugas dan fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik. Beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin adalah :

1. Terbatasnya aparatur yang dimiliki Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dengan jumlah hanya 15 orang struktural , 4 orang Staf dan 24 orang tenaga fungsional penyuluh KB (1 orang penyuluh membina 4 desa) dimana untuk penyuluh KB sudah menjadi pengawai pusat sejak Tahun 2018.
2. Belum optimal pelaksanaan kegiatan operasional program
3. Masih rendahnya peran serta pria dalam mengikuti program Keluarga Berencana

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang di capai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan arahan dari kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Tapin
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	911.586.032	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	911.586.032	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bulan)	12	66.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bulan)	12	66.000.000	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12	5.000.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12	30.185.836	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12	30.185.836	

4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	9.400.000	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	9.400.000	
5	Penyediaan makanan dan minuman	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian makanan dan minuman rapat bulanan (bulan)	12	44.490.000	Penyediaan makanan dan minuman	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian makanan dan minuman rapat bulanan (bulan)	12	44.490.000	
6	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tapin	Waktu Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas luar daerah dan dalam (bulan)	12	631.655.696	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tapin	Waktu Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas luar daerah dan dalam (bulan)	12	631.655.696	
7	Tapin Expo	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo (kali)	1	20.000.000	Tapin Expo	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo (kali)	1	20.000.000	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tapin	Waktu kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan	12	59.850.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tapin	Waktu kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan	12	59.850.000	
9	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihankeamanan kantor dan bahan pembersih	12	45.004.500	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihankeamanan kantor dan bahan pembersih	12	45.004.500	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	372.100.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	372.100.000	

1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (roda 4 dan 2) (Unit)	48	109.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (roda 4 dan 2) (Unit)	48	109.500.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	5.000.000	
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan kantor	12	107.600.000	Pengadaan Peralatan Kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan kantor	12	107.600.000	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (bulan)	12	150.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tapin	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (bulan)	12	150.000.000	
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100	12.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100	12.000.000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tapin	Jumlah pelaksanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13	6.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tapin	Jumlah pelaksanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13	6.000.000	

2	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2	6.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2	6.000.000	
IV	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi		Persentase Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	87	138.809.000	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi		Persentase Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	87	138.809.000	
1	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu (bulan)	12	27.300.000	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu (bulan)	12	27.300.000	
2	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Tapin	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD) (Akseptor)	608	31.809.000	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Tapin	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD) (Akseptor)	608	31.809.000	
3	Pelayanan KB Medis Operasi	Tapin	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita (orang)	130	26.850.000	Pelayanan KB Medis Operasi	Tapin	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita (orang)	130	26.850.000	
4	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB (bulan)	12	21.300.000	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB (bulan)	12	21.300.000	
5	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Tapin	Jumlah Pelaksanaan kegiatan monitoring Evaluasi alat Obat dan Kontrasepsi KB (Desa)	136	10.500.000	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Tapin	Jumlah Pelaksanaan kegiatan monitoring Evaluasi alat Obat dan Kontrasepsi KB (Desa)	136	10.500.000	

6	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kesertaan KB dan Kespro (orang)	26	21.050.000	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kesertaan KB dan Kespro (orang)	26	21.050.000	
V	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Persentase Peserta KB Aktif MKJP	8,88	63.211.000	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Persentase Peserta KB Aktif MKJP	8,88	63.211.000	
1	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	12	21.577.000	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	12	21.577.000	
2	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes (kali)	1	13.600.000	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes (kali)	1	13.600.000	
3	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana (Kelompok)	225	28.034.000	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana (Kelompok)	225	28.034.000	
VI	Program Generasi Berencana (Genre)		Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	67,02	76.550.000	Program Generasi Berencana (Genre)		Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	67,02	76.550.000	

			Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (%)	92,28				Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (%)	92,28		
1	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba kelompok PIK remaja kelompok dan kader BKR (kali)	3	18.130.000	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba kelompok PIK remaja kelompok dan kader BKR (kali)	3	18.130.000	
2	Ajang Kreativitas PIK-Remaja	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan jambore dan ajang kreativitas PIK-remaja (kali)	3	9.065.000	Ajang Kreativitas PIK-Remaja	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan jambore dan ajang kreativitas PIK-remaja (kali)	3	9.065.000	
3	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja dan kelompok BKR (Kelompok)	16	49.355.000	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja dan kelompok BKR (Kelompok)	16	49.355.000	
VII	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS (%)	92,07	364.998.500	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS (%)	92,07	364.998.500	
			Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB (%)	83,93				Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB (%)	83,93		
			Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL (%)	72,11				Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL (%)	72,11		

1	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (kali)	3	12.330.000	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (kali)	3	12.330.000	
2	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (Kelompok)	32	26.730.000	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (Kelompok)	32	26.730.000	
3	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional (kali)	3	17.905.000	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional (kali)	3	17.905.000	
4	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	Tapin	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional (kali)	2	5.080.000	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	Tapin	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional (kali)	2	5.080.000	
5	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	Tapin	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKBBKL dan orang tua hebat (kali)	3	23.270.000	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	Tapin	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKBBKL dan orang tua hebat (kali)	3	23.270.000	
6	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Tapin	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK (kali)	3	20.238.000	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Tapin	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK (kali)	3	20.238.000	

7	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL) (Kelompok)	2	249.072.500	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL) (Kelompok)	2	249.072.500
8	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Tapin	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (kali)	3	10.373.000	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Tapin	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (kali)	3	10.373.000
VIII	Program Pengendalian Penduduk		Persentase Sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan (%)	70	29.250.000	Program Pengendalian Penduduk		Persentase Sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan (%)	70	29.250.000
1	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	12	22.910.000	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	12	22.910.000
2	Pembinaan Koalisi Kependudukan	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan koalisi kependudukan (orang)	180	6.340.000	Pembinaan Koalisi Kependudukan	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan koalisi kependudukan (orang)	180	6.340.000
IX	Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan		Persentase data yang dimanfaatkan dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	70	41.750.000	Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan		Persentase data yang dimanfaatkan dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	70	41.750.000

1	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB (Dokumen)	240	41.750.000	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB (Dokumen)	240	41.750.000	
X	Program Advokasi dan Penggerakan		Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra Kerja (%)	35	153.155.000	Program Advokasi dan Penggerakan		Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra Kerja (%)	35	153.155.000	
1	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan advokasi (bulan)	12	43.415.000	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan advokasi (bulan)	12	43.415.000	
2	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi kampung KB (orang)	250	60.290.000	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi kampung KB (orang)	250	60.290.000	
3	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	12	49.450.000	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	Tapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	12	49.450.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin selama tahun 2018 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan – kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah .

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Rancangan awal) , yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2020 yang terkait untuk menunjukkan Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA , yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga ,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif , demokratis dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas Korupsi, Bermartabat , dan Terpercaya,
5. Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan Masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan Produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia Lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan Revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Pada Perencanaan Pembangunan Jangka panjang daerah kabupaten Tapin tahun 2005 -2025 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari Internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru – paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah – tengah wilayah indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, Regional ASEAN , hingga global atau Internasional. Dalam Koridor nasional, wilayah kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksportor batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level Internasional , selain sebagai paru –paru dunia juga kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

Pada Perencanaan Pembangunan nasional periode ini, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan yang diusung adalah :

1. Mempertahankan fungsi kalimantan sebagai paru –paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis , hutan lindung, dan hutan produksi , serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi Nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi batubara terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing – masing Provinsi;
3. Pengembangan Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet,bauksit,bijih besi ,gas alam cair , pasir zirkon, dan pasir kuarsa ; dan
4. Menjadikan kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan adalah mendorong percepatan dan Perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerahnya masing – masing melalui :

1. Pengembangan Hilirisasi Komoditas Batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit , Karet , bauksit , bijih besi , gas alam cair, pasir zircon , dan pasir kuarsa ;
2. Penyediaan Infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu Internasional, isu dan kebijakan Strategis nasional, Isu dan Kebijakan Strategis Provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Pembangunan Provinsi Kalimantan selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Sustainability Development sebagai Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun.

Sasaran (Objektivitas) bersifat spesifik dan terukur satu tujuan dapat mempunyai lebih dari satu sasaran. Sasaran berjangka pendek dan mencerminkan cara mencapai tujuan dan mensukseskan rencana. Sasaran diikuti dengan indikator sasaran yang merupakan tanda ukuran, kriteria yang menyatakan apakah suatu sasaran yang lebih ditetapkan tercapai atau tidak, maka ditetapkan sasaran dan indikator sasaran .

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPPKB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah DPPKB Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pelayanan Sekretariat
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan
- 3) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur , yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan , semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tapin sebagai langkah untuk mencapai tujuan , maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Meningkatnya Kesertaan ber-KB
3. Terkendalinya Angka Kelahiran
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran DPPKB Kabupaten Tapin

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	69,72	69,72	70,42	71,12	71,83	72,55	73,28
		Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeed Need)	9,92	9,11	9,88	9,84	9,82	9,76	9,70

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase Peningkatan Kesertaan Ber-KB (CPR)	82,88	82,98	83,12	83,16	83,20	83,25	83,30
		Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,20	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa		Indeks desa membangun (poin)	0,54	0,54	0,56	0,57	0,59	0,6	0,6
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam program KKBPK	65	70	72	75	77	80	85

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai Kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan – Permasalahan yang dihadapi, Menjawab tantangan Pembangunan, serta Memaksimalkan Peluang yang ada.

Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 beserta Prognosisnya dapat dilihat pada Lampiran dibawah ini .

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Tapin
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2020 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2021		
					Tolak Ukur	Targ et	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							2.163.409.532	0	0		2.271.580.009
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	8											
2	8	1				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	911.586.032	0	0	100	957.165.334
2	8	1	1		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bulan)		66.000.000	0	0		69.300.000
2	8	1	2		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)		5.000.000	0	0		5.250.000
2	8	1	3		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor (bulan)		30.185.836	0	0		31.695.128
2	8	1	4		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)		9.400.000	0	0		9.870.000

2	8	1	5	Penyediaan makanan dan minuman		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian makanan dan minuman rapat bulanan (bulan)		44.490.000	0	0		46.714.500
2	8	1	6	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi		TAPIN	Waktu Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas luar daerah dan dalam (bulan)		631.655.696	0	0		663.238.481
2	8	1	7	Tapin Expo		TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo (kali)		20.000.000	0	0		21.000.000
2	8	1	8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		TAPIN	Waktu kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan		59.850.000	0	0		62.842.500
2	8	1	9	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihankeamanan kantor dan bahan pembersih		45.004.500	0	0		47.254.725
2	8	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	372.100.000	0	0	100	390.705.000
2	8	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (roda 4 dan 2) (Unit)		109.500.000	0	0		114.975.000
2	8	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		5.000.000	0	0		5.250.000
2	8	2	3	Pengadaan Peralatan Kantor		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan kantor		107.600.000	0	0		112.980.000
2	8	2	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		TAPIN	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor (bulan)		150.000.000	0	0		157.500.000
2	8	3		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	12.000.000	0	0	100	12.600.000

2	8	3	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			TAPIN	Jumlah pelaksanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		6.000.000	0	0		6.300.000
2	8	3	2	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun		6.000.000	0	0		6.300.000
2	8	4		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi				Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,10 %	138.809.000	0	0	2,09	145.749.450
2	8	4	1	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu (bulan)		27.300.000	0	0		28.665.000
2	8	4	2	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD) (Akseptor)		31.809.000	0	0		33.399.450
2	8	4	3	Pelayanan KB Medis Operasi			TAPIN	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita (orang)		26.850.000	0	0		28.192.500
2	8	4	4	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB (bulan)		21.300.000	0	0		22.365.000
2	8	4	5	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB			TAPIN	Jumlah Pelaksanaan kegiatan monitoring Evaluasi alat Obat dan Kontrasepsi KB (Desa)		10.500.000	0	0		11.025.000
2	8	4	6	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kesertaan KB dan Kespro (orang)		21.050.000	0	0		22.102.500
2	8	5		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				Persentase peserta KB aktif MKJP	8,88 %	63.211.000	0	0	8,87	66.371.550
2	8	5	1	Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes		21.577.000	0	0		22.655.850

2	8	5	2	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes (kali)		13.600.000	0	0		14.280.000
2	8	5	3	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kemah bhakti saka kencana (Kelompok)		28.034.000	0	0		29.435.700
2	8	6		Program Generasi Berencana (Genre)				Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	67,02 %					
								Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	92,28 %	76.550.000	0	0	92,36	80.377.500
2	8	6	1	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba kelompok PIK remaja kelompok dan kader BKR (kali)		18.130.000	0	0		19.036.500
2	8	6	2	Ajang Kreativitas PIK-Remaja			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan jambore dan ajang kreativitas PIK-remaja (kali)		9.065.000	0	0		9.518.250
2	8	6	4	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja dan kelompok BKR (Kelompok)		49.355.000	0	0		51.822.750
2	8	7		Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS	92,07 %					
								Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB	83,93 %					
								Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	72,11 %	364.998.500	0	0	73,61	383.248.425
2	8	7	1	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (kali)		12.330.000	0	0		12.946.500

2	8	7	2	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (Kelompok)		26.730.000	0	0		28.066.500
2	8	7	3	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional (kali)		17.905.000	0	0		18.800.250
2	8	7	4	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional			TAPIN	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional (kali)		5.080.000	0	0		5.334.000
2	8	7	6	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat			TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKBBKL dan orang tua hebat (kali)		23.270.000	0	0		24.433.500
2	8	7	7	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK			TAPIN	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK (kali)		20.238.000	0	0		21.249.900
2	8	7	10	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan BKL) (Kelompok)		249.072.500	0	0		261.526.125
2	8	7	11	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			TAPIN	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) (kali)		10.373.000	0	0		10.891.650
2	8	8		Program Pengendalian Penduduk		Terkendalin ya Angka Kelahiran		Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	70%	29.250.000	0	0	75	30.712.500
2	8	8	1	Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan		22.910.000	0	0		24.055.500
2	8	8	2	Pembinaan Koalisi Kependudukan			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan koalisi kependudukan (orang)		6.340.000	0	0		6.657.000
2	8	9		Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan				Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	75%	41.750.000	0	0	80	43.837.500

2	8	9	1	Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembuatan analisa data dan informasi kependudukan dan KB (Dokumen)		41.750.000	0	0		43.837.500
2	8	1	0	Program Advokasi dan Penggerakan				Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	35%	153.155.000	0	0	40	160.812.750
2	8	1	0	Penyebarluasan Informasi dan Advokasi			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan advokasi (bulan)		43.415.000	0	0		45.585.750
2	8	1	0	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi kampung KB (orang)		60.290.000	0	0		63.304.500
2	8	1	0	Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB			TAPIN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB		49.450.000	0	0		51.922.500
TOTAL										2.163.409.532	0	0		2.271.580.009

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengendalian Penduduk merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dalam masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program Prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dan tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian pertanggungjawaban.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-prpgram prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebuuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (otutcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber dana lainnya (APBN)

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2020 (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.163.409.532
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	911.586.032
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	66.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.185.836
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	9.400.000
Penyediaan makanan dan minuman	44.490.000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	631.655.696
Tapin Expo	20.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	59.850.000
Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	45.004.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	372.100.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	109.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000
Pengadaan Peralatan Kantor	107.600.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	150.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	6.000.000
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi	138.809.000
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	27.300.000
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	31.809.000
Pelayanan KB Medis Operasi	26.850.000
Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	21.300.000
Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	10.500.000
Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	21.050.000
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	63.211.000
Penilaian KB MKJP, Bidan KB Teladan, KB Lestari, Kesatuan Gerak PKK KKBPK dan KB Kes	21.577.000
Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	13.600.000

Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	28.034.000
Program Generasi Berencana (Genre)	76.550.000
Lomba Kelompok PIK Remaja,Kelompok dan kader BKR	18.130.000
Ajang Kreativitas PIK-Remaja	9.065.000
Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	49.355.000
Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	364.998.500
Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	12.330.000
Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	26.730.000
Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	17.905.000
Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	5.080.000
Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	23.270.000
Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	20.238.000
Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	249.072.500
Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	10.373.000
Program Pengendalian Penduduk	29.250.000
Pembinaan Pelajar Peduli Kependudukan	22.910.000
Pembinaan Koalisi Kependudukan	6.340.000
Program penyediaan Data dan Informasi kependudukan	41.750.000
Pembuatan Analisa Data dan Informasi Kependudukan dan KB	41.750.000
Program Advokasi dan Penggerakan	153.155.000
Penyebarluasan Informasi dan Advokasi	43.415.000
Pembinaan, monitoring dan evaluasi Kampung KB	60.290.000
Lomba PKB / PLKB dan Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	49.450.000
	2.163.409.532

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2020 ini merupakan dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang merupakan Rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2020.

Rencana Kerja Memuat tujuan dan sasaran ,Program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Dengan Mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD Dinas Pengendalian Pemduduk dan Keluarga Berencana , Penyusunan Renja Diharapkan mampu Mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik diintern SKPD Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dilingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan didalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi dan Misi kepala daerah periode 2018-2023 yaitu “ Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis “.

BUPATI TAPIN,

H.M. ARIFIN ARPAN